



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora.

pada tanggal : 19 Maret 2025.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



GADUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS DILINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
 TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INTEGRITAS
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU																
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja ZI/Kelompok Kerja Tahun sebelumnya, anggotanya terdiri dari Komisioner KPU dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Blora	SK Tim ZI/Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Blora	√												TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasi kan kepada seluruh pegawai, dan sosialisasi melalui website resmi KPU Kab. Blora	Dokumen rencana aksi pembangunan ZI dipublikasikan melalui rapat dan website resmi KPU Kab. Blora	√												
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (persemester/ triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI persemester/tri wulan	Undangan Rapat, Daftar Hadir, lembar monev ZI, pelaksanaan dan tindaklanjut			√			√			√			√	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran	Rekapitulasi absensi pimpinan yang ditandatangani	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WBK/WBBM	setiap hari seperti pegawai yang lain														
		Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	SK Tim Reformasi Birokrasi	√												
II	Penataan Tata Laksana																
1	Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami oleh seluruh pegawai serta SOP telah dievaluasi	Penyusunan dan mensosialisasi SOP pada Website KPU Kab. Blora	Mensosialisasi SOP pada Website KPU Kab. Blora	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TIM PENATAAN TATA LAKSANA
2	E-Office Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasional manajemen SDM sudah menggunakan teknologi	Surat Edaran KPU	Presensi berbasis Aplikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Informasi															
		Pelayanan Publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi Pelayanan Publik	Aplikasi JDIH, PPID, Website KPU Kabupaten Blora	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Pemanfaatan IT dalam rangka pengukuran kinerja unit, operasional SDM, dan pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan IT	Laporan monitoring dan evaluasi aplikasi IT												√	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	KPU Kabupaten Blora menerapkan keterbukaan informasi publik dan menyediakan secara mudah, jelas, akurat dan	Dokumen-dokumen kepemilikan dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara onlin melalui e-PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			tepat waktu														
		Mengikuti evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Mengikuti Rapat Evaluasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh KPU Prov. Jateng	Laporan Monev keterbukaan informasi publik													
III	Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara																
1	Perencanaan Pegawai Sesuai Kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun unit kerja sesuai peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan kebutuhan pegawai (laporan kepegawaian)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
2	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	Pegawai di unit kerja mengikuti diklat dan uji kompetensi lainnya	Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat maupun uji kompetensi	Surat usulan dan surat tugas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penetapan Kinerja	Terdapat penetapan kinerja yang terkait dengan	Menyusun perjanjian kinerja Eselon III dan IV	Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV yang ditandatangani	√												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		kinerja organisasi															
		Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Melaksanakan pengukuran kinerja	BA/Laporan pengukuran kinerja						√						√	
		Pengukuran kinerja dijadikan dasar penilaian kinerja	Melaksanakan penilaian kinerja PNS	SKP, LKjIP												√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dilaksanakan/diimplementasikan	Sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin pegawai	Penanganan disiplin pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Sistem Informasi Kepagawian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Laporan daftar nominatif pegawai setiap bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
IV	Pengawasan																
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan	Sekretis KPU Kabupaten Blora memberikan arahan dan menandatangani	RKKL	√												TIM PENGAWASAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ani RKKL														
		Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan dan penetapan kinerja	Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan Renstra, IKU, LAKIP	Dokumen Renstra, IKU, LAKIP	√												
2	Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Terdedianya dokumen perencanaan kinerja	Penyusunan Renstra, IKU, PK, RKT, RAK	Dokumen Renstra, IKU, PK, RKT, RAK	√												
		Laporan kinerja disusun tepat waktu	Menyusun laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Dokumen LAKIP	√												
V	Penguatan Akuntabilitas Kinerja																
1	Pengendalian Gratifikasi	Pengendalian Gratifikasi dilingkungan KPU Kab. Blora	Sosialisasi dalam bentuk poster serta internalisasi gratifikasi dan benturan	Poster, dokumen sosialisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			kepentingan dilingkungan satuan kerja														
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal dilingkungan KPU Kab. Blora	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kab. Blora	Kartu Kendali SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Dokumen penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	√												
		Penegralian kegiatan untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindaklanjut Pengendalian	Dokumen Rencana Tindaklanjut Pengendalian	√												
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi pengaduan masyarakat ke pegawai KPU	Brosur penyampaian pengaduan masyarakat		√											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kabupaten Blora														
		Pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan / tindaklanjut atas daftar pengaduan yang disampaikan Inspektorat	Bukti Tanggapan			√			√			√			√	
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi			√			√			√			√	
4	Whistle Blowing System	Whistle Blowing System sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blowing System, serta sosialisasi tata cara penyampaian	Barner saluran penyampaian WBS		√											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			WBS di KPU Kabupaten Blora dengan cara berkoordinasi Inspektorat														
		Whistle Blowing System telah diterapkan	Implementasi Whistle Blowing System	Laporan hasil rapat internal WBS dan KPU Kabupaten/Kota			√			√			√			√	
		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah dilakukan	KPU Kabupaten Blora berkoordinasi dengan Inspektur KPU untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Blora	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap tri Wulan			√			√			√			√	
		Hasil evaluasi atas	Penerapan Rekomendasi	Tabel rekapitulasi tindaklanjut			√			√			√			√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		penerapan WBS telah ditindaklanjuti	hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat	penanganan WBS													
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilingkungan KPU Kabupaten Blora	Penandatanganan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan		√											
		Telah dievaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Blora	Pelaksanaan evaluasi penanganan benturan kepentingan			√			√			√			√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dari penanganan benturan kepentingan	Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan			√			√			√			√	
VI	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik																
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan public	Standar pelayanan PPID dan RPP	√												TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan informasi	Maklumat standar pelayanan public	√												
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia diruang pelayanan	SOP diruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Budaya pelayanan prima	Informasi tentang pelayanan	Informasi tentang standar	Halaman website dan media sosial KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		mudah diakses melalui berbagai media	pelayanan yang tertera di website dan berbagai media														
		Telah terdapat sistem punishmen (sangsi)/reward bagi pelaksana pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan RPP yang terintegrasi dalam 1 atap, dan help desk	PPID dan RPP terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu, help desk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Terdapat inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoax Pemilu pada website KPU untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	Laporan periodic jumlah klarifikasi hoax yang dipublikasikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penilaian Kepuasan Masyarakat	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelanan Helpdesk dan PPID	Laporan hasil survey						√						√	
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Screensot dari website						√						√	
		Dilakukan tindaklanjut hasil survey kepuasan	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan	Analisis kepuasan masyarakat dan						√						√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		masyarakat	masyarakat	tindaklanjtnya													

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA